PKM PEMBERDAYAAN EKONOMI KELUARGA KAMPUNG KB NUSA INDAH KELURAHAN PANNAMPU KECAMATAN TALLO KOTA MAKASSAR

AHMAD SYAEKHU (asyaekhu71@gmail.com)

IRWAN (irwanunsa 212@gmail.com)

***ABSTRAK***

*Undang-Undang nomor 52 tahun 2009, tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, sebagai dasar pelaksanaan Program kependudukan dan Keluarga Berencana menegaskan bagi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana tidak hanya sebatas ada masalah KB dan KS saja, di mana diberi mandat untuk dapat turut mensukseskan Agenda Prioritas Pembangunan Nasional (Nawacita), terutama Mawacita 3 (tiga), yaitu membangun masyarakat dari dari wilayah pinggiran dengan program Pembentukan Kampung KB pada tingakatan wilayah pemerintahan yang paling bawah yang bersentuhan langsung dengan masyarakat yaitu RW/Dusun.*

*Pengelolaan Kampung KB se Kota Makassar pada tahun 2016 setahun sesudah Lorong KB, yaitu tahun 2015, oleh karena itu, program KB digalakkan sejalan dengan peningkatan kualitas pelayanan publik dan yang diharapkan dapat meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap tata lorong yang indah dan bersih dan meningkatkan kualitas capaian peserta KB, baik untuk akseptor KB maupun capaian untuk penigkatan kesejahteraan masyarakat melalui bina keluarga dan usaha ekonomi keluarga*

*Kemiskinan menjadi salah satu masalah di Indonesia sejak dulu hingga sekarang apalagi sejak terhampas dengan pukulan krisis ekonomi dan moneter yang terjadi sejak Tahun 1997. UPPKS merupakan kelompok kegiatan pendukung program KB yang anggotanya terdiri dari keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga sejahtera I, dalam rangka peningkatan kesejahteraan keluarga melalui kegiatan yang produktif (wirausaha) dengan pendekatan produk lokak (daur ulang), agar kehidupanya menjadi lebih sejahtera . Dengan demikian UPPKS ini diharapkan menjadi model usaha mikro keluarga yang berfungsi untuk menggerakkan roda ekonomi keluarga melalui pembelajaran ekonomi dengan cara menggugah minat dan semangat keluaga untuk berwirausaha (BKKBN, 2005).*

*Sekarang ini kegiatan kelompok UPPKS telah banyak mengalami kemunduran dibuktikan dengan menurunnya aktifitas kelompok dan kualitas kegiatan kelompok UPPKS. Semua itu bila diidentifikasi disebabkan oleh beberapa hal :1). Lemahnya tokoh pengurus kelompok,2). Pembinaan yang dilakukan oleh petugas Penyuluh KB belum kontinew, secara umum materinya hanya menyangkut pelaporan, administrasi dan pembukuan belum optimal, 3).Sulitnya memperoleh pinjaman modal yang murah dan mudah., 4). Masih lemahnya dalam pemilihan jenis usaha yang sesuai dengan potensi daerah., 5). Kesulitan dalam hal pemasaran.dan 6). Rendahnya kualitas SDM.*

*Dengan demikian proyek pengabdian pengabdian kepada Masyarakat ini diadakan sebagai suatu bentuk kontribusi untuk membantu membimbing dan melatih para Kelompok UUPKS untuk memiliki kemampua dalam, 1). Memilih pengurus yang lebih paham tentang pengelolaan kelompok, yang mempunyai sifat dan watak yang baik, berorientasi pada kemajuan untuk meraih kesuksesan, 2). Memberikan motivasi kepada para petugas lapangan KB, agar supaya memberikan pembinaan yang secara kontinyu kepada kelompok UPPKS , 3). Membantu dan memfasilatsi kelompok UPPKS dalam persoalan mengelolah modal secara optimal sehingga usaha kelompok yang dijalankan dapat berjalan lancer, 4). Mendorong kelompok UPPKS untuk mengembangkan jenis usaha dari produk lokal yang ada di sekitaran lingkungan tempat tinggal (daur ular), 5). Peningkatkan kualitas SDM dengan memberikan pelatihan dan ketrampilan serta penyampaian program yang baik, 6). Meningkatkan mitra dalam hal pemasaran hasil kegiatan kelompok UPPKS, dengan sistim suatu bentuk kerja sama di mana pemberi waralaba*

*Kata Kunci : Kemiskinan, UPPKS, Oleh, Dari dan Kampung KB*

***ABSTRACT***

*Law number 52 of 2009, concerning Population Development and Family Development, as the basis for the implementation of the Population and Family Planning Program emphasizes that the Office of Population and Family Planning Control is not only limited to KB and KS problems, which are mandated to be able to contribute to the success of the Agenda National Development Priorities (Nawacita), especially Mawacita 3 (three), namely building communities from the periphery with the KB Village Formation program at the lowest level of government area which is in direct contact with the community, namely RW / Dusun.*

*Management of KB villages in Makassar City in 2016 a year after the KB Hallway, namely in 2015, therefore, the family planning program is promoted in line with improving the quality of public services and is expected to increase public awareness of beautiful and clean hallways and improve the quality of participants' achievements KB, both for family planning acceptors and achievements for improving the welfare of the community through family development and family economic efforts*

*Poverty has been one of the problems in Indonesia since then until now especially since it was struck by the economic and monetary crisis that occurred since 1997. UPPKS is a group of activities supporting family planning programs whose members consist of Pre-prosperous families and Prosperous families I, in the framework of improving family welfare through productive activities (entrepreneurship) with a localized product approach (recycling), so that their lives become more prosperous. Thus the UPPKS is expected to be a model of micro-family businesses that function to move the wheels of the family economy through economic learning by arousing the interest and enthusiasm of the family for entrepreneurship (BKKBN, 2005).*

 *At present UPPKS group activities have suffered a setback as evidenced by the decline in group activities and the quality of UPPKS group activities. All of that if identified is caused by several things: 1). Weak leaders of group administrators, 2). The guidance done by KB counselors is not continuous, in general the material only concerns reporting, administration and bookkeeping is not optimal, 3). The difficulty of obtaining cheap and easy capital loans, 4). Still weak in choosing the type of business that is in accordance with the potential of the region., 5). Difficulties in marketing and 6). Low quality of human resources. Thus the community service project was held as a form of contribution to help guide and train the UUPKS groups to have proficiency in, 1). Choosing administrators who are more knowledgeable about group management, who have good character and character, are oriented toward progress to achieve success, 2). Provide motivation to KB field workers, so that they provide continuous training to UPPKS groups, 3). Assisting and facilitating UPPKS groups in the matter of optimally managing capital so that the group businesses they run can run smoothly, 4). Encourage the UPPKS group to develop the type of business from local products that are in the vicinity of the neighborhood (snake cycle), 5). Improving the quality of human resources by providing training and skills as well as the delivery of good programs, 6). Increase partners in terms of marketing the results of UPPKS group activities, with a system of cooperation in which the franchisor Keywords: Poverty, UPPKS, By, From and KB Village*

**PENDAHULUAN**

Udang-Undang nomor 52 tahun 2009, tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, sebagai dasar pelaksanaan Program kependudukan dan Keluarga Berencana menegaskan bagi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana tidak hanya sebatas ada masalah KB dan KS saja, di mana ada empat sub urusan bidang Pengendalian Penduduk dan keluarga Berencana yang harus dilaksanakan oleh masing-masing tingkatan pemerintahan yaitu 1. Sub Urusan Pengendalian Penduduk, 2. Sub Urusan Keluarga Berencana, 3. Sub Urusan Keluarga Sejahtera, dan 4. Sub Unsur Standarisasi dan Sertifikasi. Terkait dengan itu, maka diberi mandat untuk dapat turut mensukseskan Agenda Prioritas Pembangunan Nasional (Nawacita), terutama Mawacita 3 (tiga), yaitu membangun masyarakat dari dari wilayah pinggiran dengan program Pembentukan Kampung KB pada tingakatan wilayah pemerintahan yang paling bawah yang bersentuhan langsung dengan masyarakat yaitu RW/Dusun.

Pengelolaan Kampung KB se Kota Makassar pada tahun 2016 setahun sesudah Lorong KB, yaitu tahun 2015, oleh karena itu, program KB digalakkan sejalan dengan peningkatan kualitas pelayanan publik dan yang diharapkan dapat meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap tata lorong uang indah dan bersih dan meningkatkan kualitas capaian peserta KB, baik untuk akseptor KB maupun vapaian untuk penigkatan kesejahteraan masyarakat melalui bina keluarga dan usaha ekonomi keluarga.

Gambaran umun kampong KB Nusa Indah Pennampu, Secara Administrasi Kelurahan Pannampu termasuk dalamWilayah Kecamatan Tallo Kota Makassar teridi dari 6 RW , 44 RT, dengan luas wilayah 0.46 Km2 yang mempunyai 4,561 KK dengan jumlah penduduk sekitar 16,866 jiwa yang terdiri dari 8,557 laki-laki dan 8,309 perempuan. Kelompok Kegiatan (Poktan) BKB, BKR, BKL dan UPPKS yang sudah terbentuk ada 2 kelompok masing-masing 1 (satu) kelompok di ORW O4 dan  1 (satu) kelompok di ORW 05. Pada umumnya mata pencaharian penduduk adalah sebagai buruh, karyawan swasta, sebagian kecil nelayan, pedagang kecil dan pegawai.

Permasalahan dibidang ekonomi di Kelurahan Pannampu adalah adanya warga miskin usia produktif tidak mampu untuk meningkatkan pendapatan bahkan tidak mampu untuk membuat usaha di sebabkan karena :  Keterbatasan wawasan manajemen,   kelemahan disektor permodalan,  kurangnya pengembangan keterampilan,  dan keterbatasan informasi  lapangan kerja

UPPKS merupakan kelompok kegiatan pendukung proram KB yang anggotanya terdiri dari keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga sejahtera I, dalam rangka peningkatan kesejahteraan keluarga melalui kegiatan wirausaha. Kelompok yang dirintis oleh BKKBN pada tahun 1976 ini bertujuan untuk meningkatkan kondisi ekonomi keluarga perseta KB agar kehidupanya menjadi lebih sejahtera . Salah satu hal yang mendasarinya adalah bahwa tanpa kondisi yang baik, mustahil keluarga akan dapat meningkatkan kesejahteraanya, dan ini harus dimulai dari memberdayaan keluarga dibidang ekonomi. Dengan demikian UPPKS ini diharapkan menjadi model usaha mikro keluarga yang berfungsi untuk menggerakkan roda ekonomi keluarga melalui pembelajaran ekonomi dengan cara menggugahminat dan semangat keluaga untuk berwirausaha (BKKBN, 2005).

 Adapun upaya yang dilakukan adalah pemberdayaan masyarakat khususnya keluarga pra sejahtera dan Sejahtera I melalui Program UPPKS, adalah kerja sama antara BKKBN dengan Departemen Tenaga Kerja yang dituangkan dalam naskah kerja sama Nomor : Kep.102/Men/1997 dan Kep. 132/Hk. 104/H.3/1997 tanggal 3 Juni 1997 tentang pengembangan produktifitas dan pemberdayaan Keluarga. Sehingga program UPPKS merupakan kelompok yang melakukan kegiatan ekonomi produktif untuk meningkatkan pendapatan keluarga dalam rangka mewujudkan keluarga Sejahtera. Program UPPKS pada prinsipnya adalah kelompok usaha ekonomi produktif yang beranggotakan ibu-ibu/wanita yang antara lain berasal dari keluarga Pra sejahtera, Sejahtera I, Sejahtera II, Sejahtera III dan sejahtera III plus baik yang belum, sedang, maupun purna peserta KB guna meningkatkan pendapatan keluarga dalam rangka mewujudkan keluarga kecil bahagia sejahtera. Secara khusus program kelompok UPPKS ditujukan kepada pemberdayaan ibu rumah tangga, melalui program ini ibu melakukan kegiatan usaha produktif / ekonomi dengan kemudahan akses pada modal sehingga dapat memberikan sumbangan bagi pendapatan keluarga. Sampai saat ini kelompok UPPKS difokuskan kepada para ibu /wanita dengan pertimbangan bahwa kaum ibu adalah anggota keluarga yang memiliki peran besar dalam mengembangkan dan melaksanakan fungsi keluarga dan potensinya dalam bidang ekonomi belum dimanfaatkan secara optimal. Di dalam program kelompok UPPKS, seorang ibu menjadi anggota dari suatu kelompok yang menjalankan usaha produktif baik secara perorangan maupun kelompok, secara konseptual program kelompok UPPKS mempunyai misi dan tujuan yang jelas dan mulia, namun kenyataannya di lapangan ditemukan permasalahan dalam implementasinya.

Semua uapaya tersebut diatas sangat dihargai dan diapresiasi, Namun upaya pemberdayaan masyarakat miskin untuk dapat mandiri, baik dalam pengertian ekonomi, budaya dan politik merupakan hakekat utama dalam penganggulangan kemiskinan. Kemampuan masyarakat untuk mewujudkan dan mempengaruhi arah serta pelaksanaan suatu program ditentukan dengan mengendalikan kemampuan yang dimilikinya sehingga pemberdayaan *(empowerment)* merupakan jiwa partisipasi yang sifatnya aktif dan kreatif . Selama ini, pemberdayaan merupakan *the missing ingredient* dalam mewujudkan partisipasi masyarakat yang aktif dan kreatif. Berbagai upaya dan kebijakan pembangunan telah dilakukan salah satunya dengan Kampung KB yang menjadi program inovatif yang strategis dalam membangun masyarakat berbasis keluarga, mensejahterakan masyarakat, serta memenuhi kebutuhan masyarakat yang bertujuan Pembangunan keluarga Sejahtera dalam rangka Peningkatan Penanggulangan kemiskinan.

**METODE**

 Berdasarkan permasalahan yang dihadapi oleh Mitra kelompok UPPKS dalam membangun suatu kelompok yang kuat maka di di pandang perlu di lakukan suatu bimbingan dan pelatihan yang sesusai dengan kebutuhan mitra. Model pelatihan yang ditawarkan kelompok UPPKS adalah membentuk karakter wirausaha yang harus memiliki keberanian tanpa keberanian untuk mencoban melangkah secara nyata, mimpi apapun juga tak mungkin bisa diraih. Kelompok mau memulai usaha harus berani bermimpi yang berarti berani menentukan cita-cita yang tinggi atau gambaran tentang masa depan yang diinginkan, selain itu berani mencoba yaitu berani memulai langkah nyata untuk meraih mimpi tersebut, meskipun harus mulai dari langkah yang kecil, dan berani gagal berarti berani menghadapi situasi yang tidak menyenangkan karena usaha yang tekah dicoba untuk dijalankan ternyata tidak memberikan hasil seperti yang diharapkan. Rangkaian kegiatan dan pelaksanaan pelatihan adalah sebagai berikut:

 Metode pelaksanaan dalam memechkan permasalahan yang dialami oleh para kelompok UPPKS di Kelurahan Panampu Kecamatan Tallo dapat dirinci sebagai berikut :

***1.Tahap persiapan***

Tahap persiapan meliputi :

* Anlisis kebutuhan ( I ), yakni dilakukan inventarisasi jenis-jenis kebutuhan yang diperlukan dalam melakukan pelatihan terhadap kelompok UUPKS di Keluarahan Panampu Kecamatan Tallo.
* Analisis kebutuhan (II), Melakukan pendataan terhadap peserta yang dapat mengikuti pelatihan yang direncanakan.
* Analisi kebutuhan (III), Yakni melakukan pendataan tentang materi-materi pembelajaran yang dilakukan terhadap kelompok UPPKS di Kelurahan Panampu Kecamatan Tallo.
* Analisis kebutuhan (IV), adalah penetapan waktu dan tempat pelatihan serta penyusunan jadwal maupun penetapan pemateri sesuai bidang keahlian.

***2.Tahap pelaksanaan****.*

Tahap pelaksanaan adalah tahap dimana semua persiapan telah selesai, maka pada tahap kegiatan pelatihan sudah dapat dilakukan. Jenis pelatihan diantaranya :

* Pelatihan tentang strategi Memilih pengurus yang lebih paham tentang pengelolaan kelompok, yang mempunyai sifat dan watak yang baik, berorientasi pada kemajuan untuk meraih kesuksesan
* Pelatihan tentang strategi Memberikan motivasi kepada para petugas lapangan KB
* Pelatihan tentang strategi Membantu dan memfasilatsi kelompok UPPKS dalam persoalan mengelolah modal secara optimal sehingga usaha kelompok yang dijalankan dapat berjalan lancar.
* Pelatihan tentang strategi Mendorong kelompok UPPKS untuk mengembangkan jenis usaha dari produk lokal yang ada di sekitaran lingkungan tempat tinggal (daur ular)
* Pelatihan tentang strategi Peningkatkan kualitas SDM dengan memberikan pelatihan dan ketrampilan serta penyampaian program yang baik sehingga perkembangan pengetahuan pengelola UPPKS lebih optimal. Di mulai dari Perencanaan yang menentukan program kelompok akan mendukungtercapainya tujuan kelompok dengan adanya perencanaan berdasatrkan jangka waktu baik jangka pendek dan jangka panjang
* Pelatihan tentang strategi Meningkatkan mitra dalam hal pemasaran hasil kegiatan kelompok UPPKS, dengan sistim suatu bentuk kerja sama di mana pemberi waralaba memberikan izin kepada penerima waralaba untuk menggunakan hak intelektualnya, seperti nama, merek dagang produk dan jasa, dan sistim operasional usahanaya. Sebagai timbal baliknya, penerima waralaba membayar suatu jumlah yang seperti pemberi waralaba.

**HASIL DAN PEMBAHASAN**

 Hasil dari kegiatana PKM ini adalah 1), Memilih pengurus yang lebih paham tentang pengelolaan kelompok, yang mempunyai sifat dan watak yang baik, berorientasi pada kemajuan untuk meraih kesuksesan, 2), Memberikan motivasi kepada para petugas lapangan KB, agar supaya memberikan pembinaan yang secara kontinyu kepada kelompok UPPK , 3),Membantu dan memfasilatsi kelompok UPPKS dalam persoalan mengelolah modal secara optimal sehingga usaha kelompok yang dijalankan dapat berjalan lancer (Amirullah;2005), Menurut Riyanto (2001), pengertian modal usaha sebagai ikhtisar neraca suatu perusahaan yang menggunakan modal konkret dan modal abstrak. Modal konkret dimaksudkan sebagai modal aktif sedangkan modal abstrak dimaksudkan modal pasif., 4) Mendorong kelompok UPPKS untuk mengembangkan jenis usaha dari produk lokal yang ada di sekitaran lingkungan tempat tinggal (daur ular), 5) Peningkatkan kualitas SDM dengan memberikan pelatihan dan ketrampilan serta penyampaian program yang baik sehingga perkembangan pengetahuan pengelola UPPKS lebih optimal. Di mulai dari Perencanaan yang menentukan program kelompok akan mendukungtercapainya tujuan kelompok dengan adanya perencanaan berdasatrkan jangka waktu baik jangka pendek dan jangka panjang, Kemudian dilanjutkan dengan pemberian materi 1), Bagaiaman membentuk kelompok yang kuat, 2) Cara memperoleh modal, 3) Memperluas jaringan pemasaran dan, 4) Meningkatkan SDM kelompok



Gambar 1. Tim memberikan materi pembentukan kelompok yang kaut dan pemdampingan pengelolaan daur ulang sampah plastik

Materi pertama pembentukan kelompok yang kuat, dimulai dengan memilih pengurus yang lebih paham tentang pengelolaan kelompok, yang mempunyai sifat dan watak yang baik, berorientasi pada kemajuan untuk meraih kesuksesan, dengan adanya kepengurusan yang kuat dengan pehamanan bagaimana menerglola kelompok yang baik dan benar dengan ditunjang sifat dan watak yang berorientasi pada kemajuan yang bertujuan meraih kesuksesan sesuai dengan tujuan kelompok itu sendiri maka keberlangsungan kegiatan kelompok akan terjaga kedapannya

Materi selanjutnya cara memperoleh modal, materi ini bertujuan untuk memberikan alternatif pemecahan masalah permodalan yang terjadi dalam mitra yaitu dengan cara membantu dan memfasilatsi kelompok UPPKS dalam persoalan mengelolah modal secara optimal sehingga usaha kelompok yang dijalankan dapat berjalan lancer (Amirullah;2005), Menurut Riyanto (2001), pengertian modal usaha sebagai ikhtisar neraca suatu perusahaan yang menggunakan modal konkret dan modal abstrak. Modal konkret dimaksudkan sebagai modal aktif sedangkan modal abstrak dimaksudkan modal pasif.

Kemudian materi selanjutnya adalah memperluas pemasaran tujuan dari materini adalah meningkatkan mitra dalam hal pemasaran hasil kegiatan kelompok UPPKS, dengan sistim suatu bentuk kerja sama di mana pemberi waralaba memberikan izin kepada penerima waralaba untuk menggunakan hak intelektualnya, seperti nama, merek dagang produk dan jasa, dan sistim operasional usahanaya. Sebagai timbal baliknya, penerima waralaba membayar suatu jumlah yang seperti pemberi waralaba.

Dan materi terakhir meningkatkan SDM anggota kelompok bertujuan yaitu peningkatkan kualitas SDM dengan memberikan pelatihan dan ketrampilan serta penyampaian program yang baik sehingga perkembangan pengetahuan pengelola UPPKS lebih optimal. Di mulai dari Perencanaan yang menentukan program kelompok akan mendukungtercapainya tujuan kelompok dengan adanya perencanaan berdasatrkan jangka waktu baik jangka pendek dan jangka panjang.

Selanjutnya di mulai dengan pelatihan pendampingan dalam proeses pembuatan daur ulang dari sampah plastik dengan kelompok UPPKS Nusa Indahyang beralamat di Kelurahan Pannampu Kecamatan Tallo, Yang dimaksud dengan kegiatan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) adalah kegiatan bersama dalam bentuk pra koperasi yang dilakukan oleh, dari dan untuk kelompok akseptor KB melalui berbagai kegiatan ekonomi produktif skala mikro/kecil, yang kegiatanya diharapkan dapat menambah / meningkatkan pendapatan keluarga dan menunjang terwujudnya pelembagaan dan pembudayaan Norma Keluarga Kecil Bahagia dan sejahtera. (NKKBS ) di masyarakat, Keanggotaan UPPKS ini terdiri dari kaum perempuan yang berstatus akseptor KB lestari, akseptor KB aktif, akseptor KB baru, akseptor KB istirahat, purna akseptor KB, calon pasangan usia subur (PUS) maupun anggota masyarakat lain yang keanggotaanya ditetapkan berdasarkan musyawarah kelompok akseptor yang bersangkutan.



 Gambar 2, Pendampingan pembuatan daur ulang sampah plastik

**SIMPULAN DAN SARAN**

Kesimpulan dari PKM ini adalah, 1), Memilih pengurus yang lebih paham tentang pengelolaan kelompok, yang mempunyai sifat dan watak yang baik, berorientasi pada kemajuan untuk meraih kesuksesan, 2), Membantu dan memfasilatsi kelompok UPPKS dalam persoalan mengelolah modal secara optimal sehingga usaha kelompok yang dijalankan dapat berjalan lancer mendorong kelompok UPPKS untuk mengembangkan jenis usaha dari produk lokal yang ada di sekitaran lingkungan tempat tinggal (daur ular), Adapun yang menjadi saran dalam kegiatan pengabdian ini adalah, 1), .Peningkatkan kualitas SDM dengan memberikan pelatihan dan ketrampilan serta penyampaian program yang baik sehingga perkembangan pengetahuan pengelola UPPKS lebih optimal. Di mulai dari Perencanaan yang menentukan program kelompok akan mendukungtercapainya tujuan kelompok dengan adanya perencanaan berdasatrkan jangka waktu baik jangka pendek dan jangka panjang, 2), Meningkatkan mitra dalam hal pemasaran hasil kegiatan kelompok UPPKS, dengan sistim suatu bentuk kerja sama di mana pemberi waralaba memberikan izin kepada penerima waralaba untuk menggunakan hak intelektualnya, seperti nama, merek dagang produk dan jasa, dan sistim operasional usahanaya. Sebagai timbal baliknya, penerima waralaba membayar suatu jumlah yang seperti pemberi waralaba.

**DAFTAR PUSTAKA**

DPPKB, 2018. *Profil Kampung KB dari Lorong KB Kota Makassar*

Ambar, Sulistiyani, 2004. *Kemitraan Dan Model pemberdayaan*, Gaya Media Jogjakarta

BKKBN, 1986*, Pedoman Oprasional Pelaksanaan Kegiatan UPPKS*, Jakarta

BKKBN, 1993, Undang-Undang Nomor 10 tahun 1992 tentang Perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga sejahtera, Jakarta.

Delly Maulana, 2007. *Mengungkap kekuatan Ekonomi Mikro Dalam Mengentaskan Kemiskinan di Indonesia*. Suara Publik. 07 March 2007

Hafsah, Mohammad Jafar, *Upaya Pengembangan Usaha Kecil dan Menengah*, Infokop Nomer XX, 2004.

Drs. Abu Huraerah, M.Si. Drs. Purwanto, M.Si.,2005, *Dinamika Kelompok* Bandunghal (62-64)

Idrus, M. 2007, *Metoden Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial* ( Pendekatan Kualitatif & Kuantitatif) UII Press Yogyakarta

Islamy, M Irfan, 2004. Membangun Masyarakat Partisipasif, Jurnal Ilmiah Administrasi Publik, 4 (2): 3-9

Jones, Charles O, 1996, *Pengantar kebijakan Publik*, Penerjemah Ricky Istamto, edisi 1, cetakan ke 3, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Kamaludin, Rustian*. Kemiskinan Perkotaan di Indonesi* : *Perkembangan Karakteristik Dan Upaya Penanggulangan* ( Seminar Pengembangan Perkotaan dan Wilayah ) Fakultas ekonomi Universitas Trisakti, Jurusan Ekonomi Pembangunan 1 Nopember 2004

Kartasasmita, Ginanjar, 1997. *Administrasi Pembangunan Perkembangan Pemikiran dan Prakteknya di Indonesia.* PT Pustaka LP3E. Jakarta

*Pengentasan Kemiskinan Melalui Pemberdayaan UKM*, Pusat Studi Ekonomi dan kebijakan Publik *( Center for Ekonomic Policy Study)*

Sjafri Sairin, 2002. *Perubahan Sosial masyarakat Indonesia*. Perspektif Antropologi. Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Soetrisno,Lukman.1997. *Kemiskinan, Perempuan dan Pemberdayaan* .Kanisius. Yogyakarta

Somodiningrat, Gunawan, 1998. *Pemberdayaan Masyarakat dan JPS*Jakarta : Gramedia Pustaka Utama

Supriatna, Tjahya. 2000. *Strategi Pembangunan dan Kemiskinan.* Rineka Cipta. Jakarta.

Suwigyo, 1986. *Administrasi Pembangunan Desa dan Sumber-sumber Pendapatan*. Ghalia, Jakarta

DPPKB, 2018. *Profil Kampung KB dari Lorong KB Kota Makassar*